



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

Pengaruh Aglomerasi Industri, Upah Minimum Provinsi Dan Jumlah Angkatan Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah Se-Pulau Sumatera Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Analisis Data Panel Tahun 2018-2024)

Putri Amalia¹, Heni Noviarita², Alief Rakhman Setyanto³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia¹²³
putriamalia141203@gmail.com¹, heninoviarita@radenintan.ac.id²,
aliefrahmansetyanto@radenintan.ac.id³,

Received: 10-09-2025; Revised: 15-09-2025; Accepted: 19-09-2025;

Keywords: *Agglomeration, Provincial Minimum Wage, Total Labor Force, Local own-source Revenue.*

ABSTRACT

Local Own-Source Revenue (PAD) is an indicator of fiscal independence and the success of regional development. On the island of Sumatra, PAD values vary between provinces, influenced by industrial agglomeration, minimum wage policies, and the size of the labor force. This study aims to analyze the influence of these three factors, namely industrial agglomeration, provincial minimum wages, and the size of the labor force, on PAD in ten provinces on the island of Sumatra for the period 2018-2024 using a quantitative approach based on panel data analysis using Common Effect, Fixed Effect, and Random Effect models. The results show that industrial agglomeration does not have a significant effect on PAD, while provincial minimum wages and the size of the labor force have a significant positive effect, and simultaneously, all three contribute significantly to the increase in PAD. These findings confirm that strengthening PAD is more determined by fair wage policies and the utilization of productive labor than by industrial concentration. From an Islamic economic perspective, these research results are in line with the principles of justice, balance, and maslahah, which emphasize the equitable distribution of economic benefits. This study contributes academically to the regional economic literature and provides practical recommendations for local governments in formulating sustainable fiscal strategies.

Kata Kunci: Aglomerasi Industri, Upah Minimum Provinsi, Jumlah Angkatan Kerja, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator kemandirian fiskal dan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Di Pulau Sumatera nilai PAD memiliki variasi antar provinsi, dipengaruhi oleh aglomerasi industri, kebijakan upah minimum, dan jumlah angkatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketiga faktor tersebut yaitu aglomerasi industri, upah minimum provinsi, dan jumlah angkatan kerja terhadap PAD di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera periode 2018-2024 dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan analisis data panel menggunakan model Common



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

Effect, Fixed Effect dan Random Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aglomerasi industri tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan upah minimum provinsi dan jumlah angkatan kerja berpengaruh positif signifikan dan secara simultan ketiganya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan PAD lebih ditentukan oleh kebijakan upah yang adil dan pemanfaatan tenaga kerja produktif dibandingkan dengan konsentrasi industri. Dalam perspektif ekonomi Islam, hasil penelitian ini sejalan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan maslahah yang menekankan pada pemerataan manfaat ekonomi. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis terhadap literatur ekonomi regional serta rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi fiskal yang berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu indikator yang merepresentasikan kemandirian fiskal dan tingkat kesejahteraan suatu daerah (Mardiasmo, 2018). PAD merupakan salah satu komponen penting dalam struktur keuangan daerah yang mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Seiring dengan semangat otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui optimalisasi PAD. Optimalisasi PAD juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dan inovasi dalam mengelola sektor ekonomi daerah. Hal ini krusial mengingat disparitas pencapaian PAD antardaerah. Di Pulau Sumatra, capaian PAD antarprovinsi menunjukkan variasi yang signifikan, mulai dari Sumatera Utara yang didukung oleh investasi dan tenaga kerja (Hafid & Amri, 2021) hingga Bangka Belitung yang masih bergantung pada sektor pertambangan (Putra & Melati, 2019). Variasi ini menekankan pentingnya mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi PAD, khususnya aglomerasi industri, upah minimum provinsi (UMP), dan jumlah angkatan kerja.

Aglomerasi industri berpotensi meningkatkan basis pajak daerah melalui aktivitas ekonomi padat modal dan tenaga kerja, sekaligus mendorong efek pengganda (multiplier effect) serta mengacu pada konsentrasi geografis perusahaan-perusahaan di sektor yang sama atau terkait di suatu wilayah. Aglomerasi ini menciptakan efisiensi ekonomi melalui pengurangan biaya produksi, efisiensi logistik, dan transfer pengetahuan antar perusahaan. Ketika suatu wilayah mengalami pertumbuhan aglomerasi industri, terjadi peningkatan aktivitas ekonomi, perluasan basis pajak, dan pertumbuhan sektor pendukung seperti jasa dan perdagangan.

Penelitian oleh wijaya et al.(2020) menunjukan bahwa tingkat aglomerasi industri di sumatera bagian selatan berpengaruh dan positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun, studi oleh febriansyah (2020) menemukan bahwa aglomerasi industri tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di sumatera utara. Penelitian oleh



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

Simanjuntak et al. (2022) menunjukkan bahwa aglomerasi industri berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD melalui peningkatan aktivitas ekonomi, pertumbuhan sektor UMKM, serta peningkatan retribusi dan pajak daerah. Dalam konteks ekonomi Islam, aglomerasi industri sejalan dengan prinsip masalah (kesejahteraan umum), karena mendorong produktivitas masyarakat dan kesejahteraan distribusi ekonomi. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh aglomerasi industri terhadap pad dapat bervariasi antar provinsi.

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi pekerja. UMP merupakan komponen penting dalam struktur biaya tenaga kerja dan dapat mempengaruhi iklim investasi di suatu daerah. UMP yang terlalu tinggi dapat menghambat investasi, terutama dari sektor-sektor padat karya. Namun, UMP yang memadai dan proporsional justru dapat meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, dan daya beli pekerja. Peningkatan konsumsi lokal dari pekerja yang mendapatkan upah layak dapat mendorong pertumbuhan sektor informal dan UMKM.

Penelitian oleh Saputri dan Setyanto (2023) menunjukan bahwa Upah Minimum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Lampung. Selain itu, studi oleh Rahman dan Putri (2021) menemukan bahwa UMP berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Pulau Sumatera. Hal ini menunjukan bahwa UMP dapat mempengaruhi pendapatan, dan pada gilirannya PAD di Pulau Sumatera.

Jumlah Angkatan Kerja adalah jumlah total pekerja dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu. Orang yang bekerja dan orang yang mencari pekerjaan merupakan angkatan kerja. Penduduk usia kerja yang bekerja atau memiliki pekerjaan tetapi menganggur sementara dan mencari pekerjaan juga dapat disebut sebagai angkatan kerja. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang terserap di sektor formal dan informal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi, yang pada gilirannya dapat memperkuat PAD. Namun, hal ini sangat bergantung pada tingkat penyerapan tenaga kerja oleh industri lokal dan kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja.

Penelitian oleh Nadia Shafa Saskia Tjaja dan Yusnida (2020) menemukan bahwa jumlah angkatan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB per kapita di wilayah Sumatera. Selain itu, studi oleh Reza Tianto (2020) menunjukan bahwa jumlah angkatan kerja dan investasi berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja dapat mempengaruhi PAD melalui peningkatan produksi dan PAD.

Secara simultan, aglomerasi industri, UMP, dan angkatan kerja saling mempengaruhi dalam membentuk dinamika ekonomi daerah. Aglomerasi industri meningkatkan permintaan tenaga kerja, sedangkan kebijakan UMP menentukan tingkat kesejahteraan pekerja yang berdampak pada produktivitas dan konsumsi lokal. Kombinasi ketiganya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, memperluas basis penerimaan pajak, dan meningkatkan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PAD. Penelitian empiris menunjukkan bahwa daerah dengan aglomerasi industri yang tinggi, UMP yang kompetitif, dan tenaga kerja yang terserap secara optimal memiliki PAD yang lebih tinggi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Data yang



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

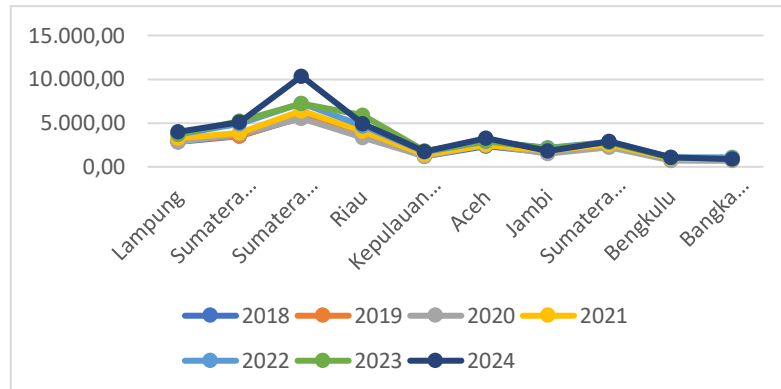
ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam rentang waktu 2018-2024. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel untuk melihat pengaruh masing-masing variabel. Adapun Pendapatan Asli Daerah di Pulau Sumatera di tunjukkan pada Grafik berikut :

Gambar 1 : Grafik PAD 10 provinsi di pulau sumatera tahun 2018-2024



Sumber Data : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) -djpk.kemenkeu.go.id

Gambar 1.1 menunjukkan Provinsi Sumatera Utara mencatatkan pertumbuhan PAD tertinggi yaitu sebesar 83,6%, menunjukkan peningkatan kinerja fiskal yang kuat, sejalan dengan temuan Hafid dan Amri (2021) yang menyatakan bahwa investasi dan tenaga kerja memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Disusul Sumatera Selatan dengan peningkatan sebesar 45,2%, menunjukkan peran dominan sektor energi dan pertambangan, sejalan dengan Wahyuni (2017) yang menyatakan bahwa potensi sektoral daerah sangat menentukan kapasitas fiskal. Provinsi Lampung (39,0%) dan Aceh (39,1%) juga menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, dipengaruhi oleh sektor jasa dan penguatan retribusi, mendukung pandangan Prasetyo & Mulyo (2016) tentang pentingnya optimalisasi potensi lokal dan kearifan fiskal yang berlandaskan pada nilai-nilai islam. Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan sebesar 43,3% yang didukung oleh kegiatan ekonomi lintas batas dan strategi geografis, sebagaimana ditegaskan Jamaluddin (2020) bahwa daerah perbatasan cenderung memiliki potensi PAD yang lebih tinggi. Riau (34,3%) dan Sumatera Barat (26,6%) mencerminkan peran penting sektor komoditi dan pariwisata, sebagaimana dijelaskan oleh Siregar (2018). Sementara itu, Bengkulu dan Jambi mengalami pertumbuhan yang lebih lambat, masing-masing sebesar 23,5% dan 10,5%, yang menunjukkan keterbatasan dalam mengelola sektor ekonomi primer dan kapasitas fiskal daerah, sesuai dengan hasil penelitian Sari & Hidayat (2021). Bangka Belitung mencatat pertumbuhan terendah hanya 2,9%, memperkuat temuan Putra & Melati (2019) bahwa ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan membuat daerah tersebut rentan terhadap fluktuasi harga global dan stagnasi PAD.

Dengan demikian, perbedaan kinerja PAD antarprovinsi mencerminkan variasi struktur ekonomi dan kapasitas fiskal di Sumatera. Daerah dengan basis ekonomi yang terdiversifikasi dan



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

pengelolaan fiskal yang efektif mampu meningkatkan PAD lebih cepat, sementara daerah yang masih bergantung pada satu sektor cenderung menghadapi stagnasi fiskal.

Penelitian ini memiliki urgensi yang kuat karena sebagian besar studi terdahulu mengenai pengaruh aglomerasi industri, upah minimum, dan tenaga kerja terhadap kinerja ekonomi daerah masih berfokus pada level nasional atau Pulau Jawa, padahal Pulau Sumatera memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, baik dari sisi struktur industri, demografi tenaga kerja, maupun ketimpangan pembangunan antarprovinsi. Keterbaruan dalam penelitian ini juga terletak pada penggunaan aglomerasi industri, pada wilayah Pulau Sumatera masih belum banyak memiliki kawasan aglomerasi industri yang lengkap dan terintegrasi secara menyeluruh. Serta beberapa penelitian terdahulu mengenai aglomerasi industri seringkali berdiri sendiri tanpa mengintegrasikan variabel tenaga kerja dan upah minimum sebagai faktor penentu dalam kebijakan fiskal antar daerah.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan ekonomi Islam untuk memberikan sudut pandang yang berbeda, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Selain itu, penggunaan data panel dari tahun 2018-2024 memungkinkan untuk dilakukannya analisis secara komprehensif baik secara temporal maupun spasial, sehingga hasil penelitian dapat dianalisis secara menyeluruh. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 7 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Menurut Al-Qur'an, ayat ini mengandung perintah Allah untuk menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pengaturan ekonomi. Dalam penelitian ini, keadilan ekonomi dapat diwujudkan melalui kebijakan upah minimum yang layak serta penciptaan kesempatan kerja yang merata melalui pengembangan aglomerasi industri. Keadilan ini juga menjadi landasan dalam menentukan kebijakan fiskal daerah yang adil, termasuk pengelolaan dan peningkatan PAD. Prinsip ini sesuai dengan ekonomi Islam yang menolak eksploitasi buruh serta mendukung penguatan ekonomi lokal demi kemaslahatan bersama.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Neo-Klasik

Teori Neo-Klasik ini berkembang berdasarkan pandangan analisis-analisis pertumbuhan ekonomi, menurut pandangan ekonomi Klasik dan berkembang pada 1950-an. Tokoh pelopor perintis teori ekonomi Neo-Klasik Adalah Robert Solow. Pokok pemikiran tertuang dalam artikel jurnal "A Contribution To The Theory Of Economic Growth" (1956).



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

Inti dari teori ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan oleh akumulasi modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan oleh akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dalam kerangka ini, pertumbuhan output suatu wilayah atau negara tidak hanya tergantung pada pertambahan jumlah faktor produksi.

Dalam kerangka ini, pertumbuhan output suatu wilayah atau negara tidak hanya bergantung pada pertambahan jumlah faktor produksi, tetapi juga pada efisiensi dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Model ini dikenal sebagai Model Pertumbuhan Solow-Swan.

Teori Keuangan Publik

Teori Keuangan Publik oleh Richard A. Musgrave yang merupakan salah satu teori fundamental dalam ekonomi sektor publik. Dalam bukunya yang berjudul “The Theory of Public Finance” (1959), menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam sistem keuangan publik: alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Fungsi alokasi menekankan upaya pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh pasar, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Fungsi distribusi berkaitan dengan upaya menciptakan pemerataan pendapatan melalui kebijakan fiskal, seperti pajak progresif, subsidi, dan program kesejahteraan sosial. Fungsi stabilisasi berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Teori Pembangunan Ekonomi

Teori pembangunan ekonomi – Dual Sektor Model oleh Arthur Lewis dalam bukunya “Economic Development With Unlimited Supplies Of Labour” (1954), menjelaskan bahwa pentingnya transformasi struktural dari sektor tradisional berproduktivitas rendah menuju sektor modern berproduktivitas tinggi.

Arthur Lewis berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai apabila surplus tenaga kerja di sektor tradisional secara bertahap dialihkan ke sektor modern. Proses migrasi tenaga kerja ini akan meningkatkan output, memperbesar akumulasi modal, serta mempercepat proses industrialisasi. Model ini menekankan hubungan erat antara pertumbuhan industri dengan distribusi pendapatan. Peralihan tenaga kerja ke sektor modern akan menaikkan produktivitas dan pendapatan, demikian pembangunan ekonomi tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga dapat memperbaiki pemerataan distribusi pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelelasan kepala daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

Dalam teori Richard A. Musgrave, PAD merupakan indikator kunci yang mencerminkan kapasitas fiskal dan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli

**Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah****ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661**

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

daerah lainnya yang sah. Faktor-faktor seperti dinamika ekonomi, kebijakan fiskal daerah, dan efektivitas pemungutan pajak secara tidak langsung memengaruhi PAD melalui kontribusi masing-masing komponen tersebut.

Lebih lanjut, teori desentralisasi fiskal memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana kebijakan pemerintah pusat dan daerah berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Kebijakan seperti perluasan basis pajak daerah, penguatan pengelolaan sumber daya daerah, atau penghapusan ketergantungan yang berlebihan pada transfer pusat seringkali diterapkan untuk memperkuat kemandirian fiskal. Namun, kebijakan-kebijakan ini dapat berdampak jangka pendek, seperti menambah beban masyarakat akibat peningkatan pungutan atau risiko ketidakseimbangan fiskal antar daerah.

Aplikasi dalam penelitian ini, PAD digunakan sebagai variabel untuk menganalisis pengaruh aglomerasi industri, upah minimum provinsi, dan tenaga kerja di sepuluh provinsi di Pulau Sumatra selama periode 2018–2024. Analisis ini bertujuan untuk memahami sejauh mana konsentrasi industri, kebijakan ketenagakerjaan, dan ketersediaan tenaga kerja produktif berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah. Fokusnya tidak hanya menyoroti peran faktor-faktor ekonomi dalam memengaruhi PAD, tetapi juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang adaptif untuk meminimalkan disparitas fiskal antardaerah dan memperkuat pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Aglomerasi Industri

Aglomerasi industri adalah konsentrasi kegiatan ekonomi (terutama industri) di suatu area tertentu, yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan-perusahaan di dalamnya karena kedekatan geografis dengan pasar, pemasok, dan tenaga kerja.

Dalam teori Neo-klasik oleh Johann Heinrich von Thunen (1826), dalam bukunya yang berjudul “Der Isolierte Staat”, memperkenalkan teori lokasi, yang menjadi salah satu gagasan fundamental dalam studi aglomerasi industri. Teori ini menjelaskan bahwa pola konsentrasi kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor lokasi, biaya transportasi, dan kedekatan dengan pasar. Von Thunen berasumsi adanya negara yang dilindungi dengan pusat kota dan wilayah sekitarnya yang digunakan untuk kegiatan pertanian dan produksi. Dalam kerangka ini, lokasi produksi menentukan tingkat keuntungan karena jarak memengaruhi biaya distribusi. Teori von Thunen menunjukkan bahwa perusahaan cenderung mengelompok di lokasi-lokasi tertentu yang dekat dengan pusat konsumsi atau pasar untuk mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi. Fenomena pengelompokan ini sejalan dengan prinsip ekonomi kedekatan, di mana kedekatan geografis antarperusahaan memungkinkan efisiensi biaya, transfer teknologi, dan pembentukan pasar tenaga kerja yang lebih besar dalam menentukan lokasi industri.

Sedangkan, Teori klasik mengenai aglomerasi berargumen bahwa aglomerasi muncul karena para pelaku ekonomi berupaya mendapatkan penghematan aglomerasi (*agglomeration economies*), baik karena penghematan lokalisasi maupun penghematan urbanisasi dengan mengambil lokasi yang saling berdekatan satu sama lain. Aglomerasi ini mencerminkan adanya sistem interaksi antara pelaku ekonomi yang sama: apakah antarperusahaan dalam industri yang sama, antar perusahaan dalam industri yang berbeda, ataupun antarindividu, perusahaan dan rumah tangga. Di lain pihak,



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

kota adalah suatu daerah keanekaragaman yang menawarkan manfaat kedekatan lokasi konsumen maupun produsen.

Tabel. 1 Implikasi Aglomerasi Berkat Skala Dan Keanekaragaman Di Perkotaan.

Faktor	Contoh	Argumen Teoritis
1. Skala Ekonomis (Scale Economies) • Dalam Produksi, Dibawah Perusahaan • Dalam Konsumsi	Skala Pabrik Yang Besar Barang Publik : Taman, Stadion Olahraga	Mills (1967), Dixit (1973) Arnott And Stiglitz (1979)
2. Berbagi Bahan Baku (Shared Inputs) • Dalam Produksi • Dalam Konsumsi	Perbaikan, Akuntansi, Hukum, Iklan. Teater, Restoran, Kultur Tinggi/Rendah.	Krugman (1993) Rivera-Batiz (1988)
3. Biaya Transaksi (Transaction Cost) • Dalam Produksi • Dalam Konsumsi	Kesesuaian Pasar Tenaga Kerja Kawasan Pembelanjaan	Helsley & Strange (1990) Acemoglu (1996) Artie (1959)
4. Penghematan Statistik (Statistical Economies) • Dalam Produksi • Dalam Konsumsi	Asuransi Bagi Pengangguran Penjualan Kembali Aset Barang-Barang Substitusi	David & Rosebloom (1990) Helsley & Strange (1991) Mills & Hamilton (1984)

Sumber : Quigley (1998: 131)

Pendekatan lain adalah mengaitkan aglomerasi sebagai suatu bentuk spasial dengan konsep "penghematan aglomerasi" melalui konsep eksternalitas. Para ekonom biasanya membedakan antara: (1) penghematan internal dan eksternal (internal economies dan external economies); (2) penghematan akibat skala ekonomis dan cakupan (economies of scale dan economies of scope). Aplikasi dalam penelitian ini, konsentrasi industri di suatu wilayah diharapkan dapat memperkuat basis ekonomi regional dengan meningkatkan aktivitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas basis pajak dan retribusi. Dengan demikian, aglomerasi industri bukan hanya fenomena spasial, tetapi juga instrumen krusial untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Namun, temuan empiris juga perlu mengkaji sejauh mana aglomerasi industri benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat potensi keterbatasan dalam menyerap manfaat ekonomi akibat lemahnya integrasi industri dengan sektor lokal.

Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Dasar hukum penetapan UMP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

**Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah****ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661**

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

Dalam teori David Ricardo, menjelaskan bahwa tingkat upah tenaga kerja ditentukan oleh prinsip upah alamiah. Menurutinya, upah alamiah adalah jumlah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja agar mereka dapat bertahan hidup dan menghasilkan tenaga kerja bagi generasi mendatang. Ricardo menekankan bahwa jika upah riil berada di atas tingkat alamiah, pertumbuhan penduduk akan terjadi karena kondisi kehidupan yang lebih baik. Pertumbuhan penduduk ini kemudian meningkatkan pasokan tenaga kerja, sehingga mendorong upah kembali ke tingkat alamiah.

Sistem upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja untuk mencegah eksploitasi oleh pengusaha. Penetapan upah minimum oleh pemerintah bertujuan untuk menjamin standar hidup yang layak. Dari perspektif ekonomi Islam, sistem upah harus adil, artinya tidak boleh terlalu rendah sehingga merugikan pekerja, dan tidak terlalu tinggi sehingga membebani pengusaha (Ruslan Abdul Ghofur, 2021).

Aplikasi dalam penelitian ini, kenaikan UMP diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong konsumsi, dan mendorong kegiatan ekonomi daerah. Peningkatan kegiatan ekonomi ini pada akhirnya akan memperluas basis pendapatan daerah, baik melalui pajak maupun retribusi. Dengan demikian, UMP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan pekerja tetapi juga berimplikasi pada kinerja keuangan daerah melalui mekanisme pertumbuhan ekonomi daerah.

Jumlah Angkatan Kerja

Jumlah Angkatan Kerja adalah jumlah total pekerja dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu. Orang yang bekerja dan orang yang mencari pekerjaan merupakan angkatan kerja. Penduduk usia kerja yang bekerja atau memiliki pekerjaan tetapi menganggur sementara dan mencari pekerjaan juga dapat disebut sebagai angkatan kerja.

Dalam teori Ekonomi klasik yang di asumsikan oleh Adam Smith, bahwa pasar tenaga kerja selalu dalam keadaan ekuilibrium. Artinya, setiap orang yang ingin bekerja pada tingkat upah yang berlaku akan memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, dalam pandangan klasik, besarnya angkatan kerja sepenuhnya bergantung pada faktor penawaran tenaga kerja yang dipengaruhi oleh tingkat upah riil. Semakin tinggi upah riil, semakin banyak orang yang bersedia menjadi bagian dari angkatan kerja.

Aplikasi dalam penelitian ini, pertumbuhan tenaga kerja produktif diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, konsumsi, dan perluasan basis pajak. Oleh karena itu, jumlah angkatan bersenjata yang dipekerjakan tidak hanya berfungsi sebagai faktor produksi tetapi juga merupakan penentu utama kemandirian fiskal daerah melalui kontribusinya terhadap PAD.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh aglomerasi industri, upah minimum provinsi, dan jumlah angkatan kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 10 provinsi di Pulau Sumatera periode 2018–2024. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Selain Data dari



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

BPS dan DJPK, penelitian ini memanfaatkan laporan dan jurnal akademik pendukung sebagai sumber untuk memperkuat argumen dan penalaran terkait pengetahuan berbasis pengalaman. Pemilihan jurnal akademik didasarkan pada kesesuaian topik, metode yang digunakan, dan reputasi jurnal (seperti jurnal yang terindeks oleh pengindeks internasional, seperti Scopus dan terdaftar di Sinta). Laporan yang dirujuk mencakup publikasi dari lembaga penelitian yang berfokus pada isu-isu pembangunan terpadu dan industrialisasi. Kombinasi data statistik kuantitatif dari BPS, DJPK, dan hasil serta laporan dari jurnal memungkinkan analisis yang komprehensif dan triangulasi data, yang dapat memperkuat validitas penelitian. (Kuncoro, M. 2013).

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Deskripsi	Indikator	Skala Pengukuran
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan asli daerah yang mengacu pada seluruh pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber ekonomi daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di daerahnya.	Pertumbuhan PAD	Rasio (Milyar Rupiah)
Aglomerasi Industri (X1)	Aglomerasi Industri mengacu pada tingkat konsentrasi atau pemusatan kegiatan industri besar dan berlokasi di suatu wilayah (provinsi) di Pulau Sumatera.	Jumlah Industri Besar Sedang	Rasio (Unit)
Upah Minimum Provinsi (X2)	Upah Minimum Provinsi mengacu pada upah per bulan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai standar pembayaran bagi pekerja.	Perbandingan UMP Antar Provinsi	Rasio (Rupiah)
Jumlah Angkatan Kerja (X3)	Jumlah Angkatan Kerja mengacu pada jumlah penduduk usia kerja (≥ 15 tahun) yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan di suatu wilayah.	Persentase total penduduk usia kerja atau aktif mencari kerja	Rasio (%)

Tabel 2 menyajikan definisi operasional dari tiga variabel dalam penelitian ini, yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y), Aglomerasi Industri (X1), Upah Minimum Provinsi (X2), dan Jumlah Angkatan Kerja (X3). Masing-masing variabel di jelaskan melalui dimensi konseptual, indikator yang mewakili, serta rumus pengukurannya.

Variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) didefinisikan sebagai total pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi suatu daerah, yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik. Indikator yang digunakan adalah pertumbuhan PAD, yang dihitung dalam rasio (miliar rupiah). Indikator ini sangat relevan karena



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

pertumbuhan PAD menunjukkan kapasitas keuangan suatu daerah untuk mencapai kemandirian anggaran. Variabel Aglomerasi Industri (X1) didefinisikan sebagai pengumpulan kegiatan industri besar dan menengah dalam suatu wilayah tertentu. Dalam studi ini, indikator yang digunakan adalah jumlah industri besar dan menengah yang terdaftar di setiap provinsi di Pulau Sumatra, dengan menggunakan skala rasio (satuan). Konsentrasi industri dinilai mampu meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas basis pendapatan daerah melalui efek pengganda pada sektor-sektor lain. Variabel Upah Minimum Provinsi (X2) didefinisikan sebagai upah bulanan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi untuk melindungi pekerja dan memastikan daya beli yang memadai. Indikator yang digunakan adalah perbandingan Upah Minimum Provinsi antardaerah dengan menggunakan skala rasio (dalam rupiah). Upah Minimum Provinsi memiliki dampak tidak langsung terhadap pendapatan daerah melalui pengaruhnya terhadap kondisi pasar tenaga kerja, efisiensi, dan aktivitas ekonomi. Variabel terakhir, Jumlah Angkatan Kerja (X3), didefinisikan sebagai keseluruhan orang yang berada dalam usia kerja (≥ 15 tahun) yang sedang bekerja atau aktif mencari pekerjaan. Indikator yang digunakan adalah persentase dari populasi usia kerja atau pelamar kerja secara keseluruhan dengan menggunakan skala rasio (%). Variabel ini mempunyai peranan penting karena berkontribusi langsung terhadap kapasitas produksi daerah serta dasar pendapatan fiskal.

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik yaitu teknik analisis regresi data panel. Data panel merupakan data kombinasi dari data runtut waktu (*Time Series*) dengan data silang (*Cross Section*). Jika suatu model Ekonometrika menggunakan data *Time Series* dan *Cross Section* dalam modelnya, kemudian dilakukan proses estimasi model yang melibatkan kedua data tersebut, maka dikatakan bahwa modelnya disebut model data panel. Penelitian ini menggunakan program Eviews 12 sebagai alat dalam menganalisis data. Model data panel yang menggabungkan data *Time Series* (t) dengan data *Cross Section* (i) memiliki bentuk umum model Ekonometrika menggunakan data panel ditunjukkan oleh notasi 'it'. Dalam proses analisis, digunakan tiga pendekatan model regresi panel, yaitu :

Common Effect Model (CEM)

Model ini sering kali disebut sebagai bentuk paling sederhana dalam Model Regresi dengan data panel. Hal tersebut karena tujuan penggunaan model CEM adalah mendapatkan jumlah data yang mencukupi dalam proses estimasi namun tidak perlu menggunakan data time series dengan periode waktu yang panjang

Fixed Effect Model (FEM)

Model ini diasumsikan penting yang digunakan dalam model FEM bahwa nilai perbedaan antarindividu (ditunjukkan oleh unobserved factor) dapat berkorelasi dengan variabel bebas. Estimasi yang digunakan adalah Panel OLS.

Random Effect Model (REM)

Model ini diasumsikan penting dalam model ini bahwa nilai perbedaan antarindividu (ditunjukkan oleh *unobserved factor*) tidak boleh berkorelasi dengan variabel bebas. Dengan kata lain, model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antarwaktu dan antarindividu.



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

Model regresi data panel menggunakan formula berikut :

$$\ln Y = \alpha + b_1 \ln X_{1it} + b_2 \ln X_{2it} + b_3 \ln X_{3it} + e$$

Keterangan :

- Y = Pendapatan Asli Daerah
 α = Konstanta
 Ln = Logaritma Natural
 X1 = Aglomerasi Industri
 X2 = Upah Minimum Provinsi
 X3 = Jumlah Angkatan Kerja
 e = Error
 i = 10 Provinsi di Pulau Sumatera
 t = Waktu (2018-2024)

Dalam menentukan model yang sesuai untuk data panel dapat dilakukan melalui pengujian beberapa model, yakni common effect, fixed effect, dan random effect. Penentuan kesesuaian model dilakukan melalui pengujian terhadap model terbaik di antara model tersebut. Selanjutnya, dalam menetapkan model dikerjakan dengan uji Chow, dan Uji Hausman.

HASIL

Analisis Data

Analisis deskriptif merupakan salah satu bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Analisis deskriptif ini dilakukan melalui pengujian hipotesis secara deskriptif. Hasil analisis tersebut adalah apakah hipotesis yang diajukan dapat digeneralisasikan atau tidak. Apabila hipotesis nol (H_0) diterima, berarti penelitian dapat digeneralisasikan. Analisis deskriptif ini menggunakan satu atau beberapa variabel tetapi bersifat independen, oleh karena itu analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan.

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
<i>Variable</i>	<i>N</i>	<i>Maximum</i>	<i>Minimum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Aglomerasi Industri (X1)	70	1.290	48	360,50	341,26
Upah Minimum Provinsi (X2)	70	3.640.000	1.888.741	2.765.404	413.297
Jumlah Angkatan Kerja (X3)	70	8.181.158	638.617	3.010.650	1.982.391
Pendapatan Asli Daerah (Y)	70	10.349,24	683,43	3.354,75	1.834,47

Berdasarkan tabel 2 di atas, N atau jumlah data setiap variabel berjumlah 70 data Aglomerasi Industri (X1) menunjukkan nilai maksimum 1.290 dan minimum 48, dengan rata-rata (*mean*) 360,50 dan std. deviation 341,26. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan yang tinggi dalam distribusi jumlah industri besar dan sedang antarprovinsi. Beberapa provinsi memiliki konsentrasi industri yang sangat tinggi, sementara provinsi lainnya memiliki jumlah industri yang sangat rendah. Data Upah Minimum Provinsi (X2) nilai maksimumnya mencapai Rp3.640.000 dan minimumnya Rp1.888.741 dengan rata-ratanya Rp2.765.404 dan std. deviation Rp413.297. Nilai ini menunjukkan



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

bahwa sebaran upah minimum antarprovinsi relatif lebih merata dibandingkan dengan variabel lainnya, meskipun masih terdapat perbedaan yang signifikan antara provinsi dengan UMP tertinggi dan terendah. Data Jumlah Angkatan Kerja (X3) memiliki nilai maksimum 8.181.158 dan minimum 638.617 dengan rata-ratanya 3.010.650 dan std. deviation 1.982.391. Angka ini menunjukkan adanya perbedaan jumlah pekerja antarprovinsi yang sangat besar, yang kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan jumlah penduduk dan kapasitas ekonomi daerah. Sementara itu, dari data Pendapatan Asli Daerah variabel terikat (Y) menunjukkan nilai maksimum Rp10.349,24 miliar dan minimum Rp683,43 miliar, dengan rata-rata Rp3.354,75 miliar dan std. deviation Rp1.834,47 miliar. Nilai tersebut mencerminkan adanya ketimpangan pendapatan daerah yang cukup tinggi antarprovinsi di Pulau Sumatera, di mana sebagian provinsi memiliki PAD yang besar dan sudah mendekati kemandirian fiskal, sedangkan sebagian provinsi lainnya masih dalam posisi fiskal yang lemah.

Common Effect Model (CEM)

Tabel 4. Hasil regresi data panel Common Effect Model

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-18.35719	1.855633	-9.892683	0.0000
AGL_Industri	0.061130	0.023793	2.569155	0.0125
UMP	0.878831	0.117748	7.463652	0.0000
JAK	0.870337	0.031657	27.492418	0.0000

Data diolah : EViews

Persamaan regresi data panel dengan *Common Effect Model* :

$$\text{PAD} = -18.357190 + 0.061130 \text{ IBS} + 0.878831 \text{ UMP} + 0.870336 \text{ JAK}$$

Berdasarkan hasil regresi data panel CEM diperoleh bahwa variabel aglomerasi industri (AGL_Industri), upah minimum provinsi (UMP), dan jumlah tenaga kerja (JAK) memiliki hubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Sumatera selama periode penelitian. Koefisien konstanta (C) sebesar -18,35719 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen bernilai nol, konstanta signifikan secara statistik dengan ($p\text{-value} = 0,0000$). Variabel AGL_Industri memiliki koefisien sebesar 0,061130 dengan ($p\text{-value} = 0,0125$), artinya setiap kenaikan satuan indeks aglomerasi industri berpotensi meningkatkan PAD sebesar 0,061130. Variabel UMP menunjukkan koefisien sebesar 0,878831 dan signifikan secara statistik pada taraf 1% ($p\text{-value} = 0,0000$). Variabel jumlah tenaga kerja (JAK) juga berpengaruh signifikan dengan koefisien sebesar 0,870337 dan ($p\text{-value} = 0,0000$).

Fixed Effect Model (FEM)

Tabel 5. Hasil regresi data panel Fixed Effect Model

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-12.845410	4.464618	-2.877157	0.0056
AGL_Industri	0.017711	0.164803	0.107468	0.9148



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

UMP	0.976195	0.258081	3.782512	0.0004
JAK	0.412717	0.403773	1.022149	0.3110

Data diolah : EViews

Persamaan regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* :

$$\text{PAD} : -12.845410 + 0.017711 \text{ IBS} + 0.976195 \text{ UMP} + 0.412717 \text{ JAK}$$

Berdasarkan hasil regresi data panel FEM menunjukkan Koefisien konstanta (C) sebesar -12,845410 dan signifikan secara statistik 1% dengan ($p\text{-value} = 0,0056$). Pada variabel aglomerasi industri (AGL_Industri), koefisiennya sebesar 0,017711 dengan ($p\text{-value} = 0,9148$). Nilai p yang tinggi menunjukkan bahwa aglomerasi industri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD pada pendekatan *Fixed Effect*. Variabel UMP masih menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap PAD, dengan koefisien sebesar 0,976195 ($p\text{-value} = 0,0004$). Variabel JAK memiliki koefisien sebesar 0,412717, namun tidak signifikan secara statistik dengan ($p\text{-value} = 0,3110$).

Random Effect Model (REM)

Tabel 6. Hasil regresi data panel Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-17.033401	2.316904	-7.351791	0.0000
AGL_Industri	0.061469	0.048318	1.272192	0.2078
UMP	0.800110	0.143652	5.569754	0.0000
JAK	0.859510	0.064714	13.281669	0.0000

Data diolah : EViews

Persamaan regresi data panel dengan *Random Effect Model* :

$$\text{PAD} : -17.033401 + 0.061469 \text{ IBS} + 0.800110 \text{ UMP} + 0.859510 \text{ JAK}$$

Berdasarkan hasil regresi data panel REM menunjukkan bahwa beberapa variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Koefisien konstanta (C) sebesar -17,033401 dan signifikan pada taraf 1% ($p\text{-value} = 0,0000$) menunjukkan bahwa pada kondisi semua variabel *independen* bernilai nol, nilai PAD sebesar -17,033401. variabel aglomerasi industri (AGL_Industry) diperoleh koefisien sebesar 0,061469 dengan ($p\text{-value} = 0,2078$). Artinya aglomerasi industri tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD pada REM, meskipun arah pengaruhnya tetap positif. Nilai p lebih besar dari 0,05. Variabel UMP memiliki koefisien sebesar 0,800110 dan signifikan secara statistik dengan ($p\text{-value} = 0,0000$). Hal ini menegaskan bahwa kenaikan UMP secara konsisten berdampak positif terhadap peningkatan PAD. Setiap kenaikan satu satuan UMP diperkirakan mampu meningkatkan PAD sebesar 0,800110. Variabel JAK menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan terhadap PAD dengan koefisien sebesar 0,859510 dan ($p\text{-value} = 0,0000$). Secara keseluruhan, hasil model REM menunjukkan bahwa UMP dan JAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan aglomerasi industri tidak signifikan.



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

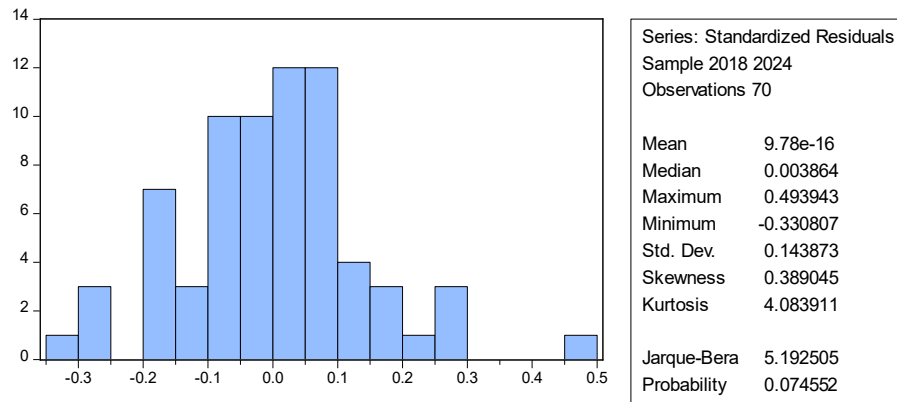
ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

Uji Normalitas

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas



Data diolah : EViews

Berdasarkan hasil gambar diatas diperoleh hasil bahwa nilai JB (*Jaque Bera*) sebesar 5.192505 dan (*p-value* = 0.074552) lebih besar dari signifikansi 0,05 (5%), sehingga H_0 diterima, yang berarti residual dalam model regresi berdistribusi normal. Artinya, penyebaran error atau residual model regresi tidak menyimpang secara signifikan dari distribusi normal.

Uji Chow

Tabel 7. Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>D.F.</i>	<i>Prob.</i>
Cross-section F	4.769748	(9,57)	0.0001
Cross-section Chi-square	39.297722	9	0.0000

Data diolah : EViews

Berdasarkan hasil Uji *Chow*, menunjukkan nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,0001 dan probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0,0000. Kedua nilai probabilitas ini jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) sehingga H_0 ditolak. Penolakan H_0 pada uji Chow menunjukkan bahwa FEM lebih tepat digunakan dibandingkan dengan CEM. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antar unit cross-section yang menunjukkan bahwa karakteristik masing-masing provinsi mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Oleh karena itu, FEM dinilai lebih akurat dalam menangkap variasi antar wilayah dibandingkan dengan CEM yang mengasumsikan intersep yang sama untuk semua provinsi, sehingga FEM lebih tepat digunakan untuk menganalisis data panel dalam penelitian ini.



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

Uji Hausman

Tabel 8. Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq D.F.</i>	<i>Prob.</i>
Cross-Section Random	1.636371	3	0.6512

Data diolah : EViews

Berdasarkan hasil Uji Hausman, nilai *Chi-Square Statistic* sebesar 1,636371 dengan D.F sebesar 3 dan ($p\text{-value} = 0,651171$). nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima yang artinya *Random Effect Model* lebih tepat digunakan dibandingkan *Fixed Effect Model*. Dengan demikian, REM dinilai lebih efisien dan sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini, karena variasi yang terjadi antar unit *Cross-Section*.

Uji F (Simultan)

Tabel 9. Hasil Uji F (Simultan)
(Random Effect Model)

<i>F-Statistic</i>	<i>Prob (F-Statistic)</i>
114.9269	0.000000

Data diolah : Eviews

Berdasarkan hasil uji F (simultan) dengan pendekatan *Random Effect Model*, diperoleh nilai *F-Statistic* sebesar 114,9269 dengan Probabilitas (*F-Statistic*) sebesar 0,000000. Nilai probabilitas ini jauh lebih kecil dari taraf signifikansi umum ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel bebas dalam model, Yaitu Aglomerasi Industri, Upah Produksi Minimum, dan Jumlah Angkatan Kerja, berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Sumatera. Artinya hasil estimasi bersama-sama atau simultan variabel independen yang terdapat pada model berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji t (Parsial)

Tabel 10. Hasil t (Parsial)
(Random Effect Model)

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>	<i>Ket.</i>
AGL_Industri (X1)	0.061470	1.272192	0.2078	H1 Ditolak
JAK (X2)	0.800111	5.569755	0.0000	H2 Diterima
UMP (X3)	0.859510	13.28167	0.0000	H3 Diterima

Data diolah : EViews

Berdasarkan hasil uji-t (parsial) pada Tabel 10 dengan pendekatan REM diperoleh maka hasil uji t (parsial) sebagai berikut:

- Nilai *t-statistic* variabel Aglomerasi Industri (AGL_Industri) sebesar 0,061469 dan nilai *t-statistik* sebesar 1,272192, dengan ($p\text{-value} = 0,2078$). Oleh karena nilai p lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,05), maka hipotesis H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

parsial, industri aglomerasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Sumatera selama periode pengamatan. Dengan demikian, peningkatan aglomerasi industri tidak dapat dijadikan sebagai faktor dominan yang secara langsung mempengaruhi PAD.

- Nilai *t-statistic* variabel Jumlah Angkatan Kerja (JAK) sebesar 0,800111, dengan *t-statistic* sebesar 5,569755 dan (*p-value* = 0,0000). Oleh karena nilai *p* lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis H2 diterima. Artinya, secara parsial, jumlah angkatan bersenjata berpengaruh signifikan terhadap PAD. Peningkatan jumlah angkatan kerja secara statistik melemah positif terhadap peningkatan PAD, yang mencerminkan kontribusi angkatan kerja terhadap kegiatan ekonomi daerah.
- Nilai *t-statistic* variabel Upah Produksi Minimum (UMP) sebesar 0,859510, nilai *t-statistic* sebesar 13,281669, dan (*p-value* = 0,0000). Oleh karena nilai probabilitasnya sangat kecil dan jauh di bawah 0,05, maka hipotesis H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial UMP berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dengan kata lain, peningkatan upah produksi minimum dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi daerah yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah.

PEMBAHASAN

Pengaruh Aglomerasi Industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah se-Pulau Sumatera Tahun 2018-2024

Berdasarkan model terbaik yaitu *Random Effect Model* (REM), aglomerasi industri (AGL_Industri) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai koefisien sebesar 0,0615 dan probabilitas sebesar 0,2078 ($p > 0,05$). Walaupun hubungan antara IBS dan PAD bersifat positif, namun secara statistik belum cukup kuat untuk membuktikan adanya pengaruh yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aglomerasi industri di wilayah Sumatera belum mencapai peningkatan kontribusi ekonomi yang berdampak langsung terhadap PAD.

Secara teoritis, aglomerasi industri seharusnya dapat mendorong pendapatan asli daerah dalam penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan produktivitas dan efisiensi akibat kedekatan antar pelaku usaha dalam satu kawasan industri (Krugman, 1991). Namun dalam konteks empiris wilayah Sumatera, potensi manfaat ekonomi tersebut tampaknya belum terealisasi secara optimal dalam bentuk peningkatan pendapatan daerah. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor:

- Minimnya Pendapatan Daerah dari Sektor Industri : Banyak kawasan industri yang beroperasi di wilayah Sumatera dikelola oleh pihak swasta nasional dan asing, sehingga kontribusi langsung terhadap PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah menjadi terbatas. Selain itu, adanya insentif fiskal dan kemudahan perizinan yang diberikan kepada pelaku industri dalam rangka menarik investasi justru dapat mengurangi potensi pendapatan asli daerah.
- Kurangnya Konektivitas antara Pemerintah Daerah dan Kegiatan Industri : Kelemahan sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku industri dapat menyebabkan hasil kegiatan



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

aglomerasi tidak terdistribusi ke sektor-sektor yang dapat mendorong PAD, seperti pajak hotel, restoran, atau hiburan. Jika industri berdiri sebagai ekonomi enclave atau ekonomi terlindungi, maka siklus ekonomi tidak banyak melibatkan masyarakat lokal atau sektor pendukung lainnya yang menjadi objek pajak daerah.

- Ketergantungan pada Dana Transfer Pusat Struktur fiskal sebagian besar provinsi di Sumatera masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Akibatnya, meskipun terdapat konsentrasi industri, kontribusi industri terhadap PAD tidak terlalu terlihat karena struktur pendapatan daerah tidak bergantung secara langsung pada kegiatan ekonomi riil di daerah tersebut.
- Permasalahan Tata Kelola dan Efektivitas Pajak Daerah : Rendahnya kapasitas tata kelola keuangan daerah dalam memungut dan mengelola pajak dan retribusi daerah dari kegiatan industri juga menjadi faktor penting. Apabila sistem pengawasan dan pemungutan pajak daerah tidak efektif, maka keberadaan aglomerasi industri tidak akan tercermin secara proporsional dalam peningkatan PAD.

Dengan demikian, temuan empiris bahwa aglomerasi industri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pad merupakan cerminan dari kompleksitas dinamika fiskal daerah dan belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian prasetyo & mulyo (2016) yang menemukan bahwa aglomerasi industri di Jawa Tengah tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, karena masih tingginya ketimpangan antar wilayah dan masih dominannya perusahaan besar yang tidak banyak menyerap input lokal. Menekankan pentingnya integrasi antara sektor industri dan ekonomi lokal untuk menghasilkan efek positif pada PAD.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Pendapatan Asli Daerah se-Pulau Sumatera Tahun 2018-2024

Upah Minimum Provinsi (UMP) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Pada model UMP, koefisien UMP sebesar 0,8001 yang menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum dapat mendorong kenaikan PAD, meskipun nilai p pada output UMP tidak valid, namun model Fixed Effect Model (FEM) memberikan validasi yang kuat dengan koefisien sebesar 0,9762 dan nilai probabilitas sebesar 0,000374 ($p < 0,01$).

Hasil ini sejalan dengan penelitian sari & haris (2020) yang menemukan bahwa kenaikan UMP secara signifikan meningkatkan kontribusi sektor konsumsi terhadap pendapatan daerah di Sumatera Barat. Menjelaskan bahwa upah minimum yang lebih tinggi dapat memicu pertumbuhan ekonomi daerah melalui konsumsi domestik dan investasi. Ini menegaskan pentingnya pengaturan UMP yang optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat keuangan daerah di Pulau Sumatera, khususnya dalam konteks ekosistem PAD. Namun perlu pula diperhatikan keseimbangan agar kenaikan UMP tidak menimbulkan beban berlebihan bagi dunia usaha di setiap daerah.



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah se-Pulau Sumatera Tahun 2018-2024

Jumlah Angkatan Kerja (JAK) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dengan koefisien sebesar 0,8595 pada model REM. Meskipun nilai probabilitas pada REM tidak valid secara statistik, namun pada model Common Effect menunjukkan signifikansi yang tinggi ($p\text{-value} = 0,0000$) dengan koefisien sebesar 0,8703. Artinya semakin banyak tenaga kerja yang tersedia maka semakin tinggi pula kapasitas produktif daerah yang pada gilirannya akan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah, baik dari sektor formal maupun informal.

Hasil ini diperkuat oleh penelitian Hafid & Amri (2021) yang menemukan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja ABRI memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD di Provinsi Aceh. Mereka memaparkan bahwa tenaga kerja merupakan faktor utama dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah, terutama jika didukung oleh produktivitas dan kesempatan kerja yang memadai. Ini menegaskan bahwa optimalisasi peran tenaga kerja memerlukan strategi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan keterampilan melalui pendidikan vokasi, pelatihan industri, dan perluasan kesempatan kerja di sektor formal merupakan kunci untuk benar-benar mengubah tenaga kerja menjadi aset produktif. Oleh karena itu, bukan hanya jumlah tenaga kerja yang krusial, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah dapat memfasilitasi penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing tenaga kerja untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap PAD.

Pengaruh Aglomerasi Industri, Upah Minimum Provinsi, dan Jumlah Angkatan Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah se-Pulau Sumatera Tahun 2018-2024

Berdasarkan hasil analisis regresi panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM) diketahui bahwa secara simultan ketiga variabel bebas yaitu Aglomerasi Industri, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi se-Pulau Sumatera periode 2018–2024. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas uji F sebesar 0,000000 yang jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. Artinya, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memiliki sumbangan nyata dalam menjelaskan variasi PAD di daerah.

Namun hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial hanya dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap PAD yaitu Upah Minimum Provinsi dan Jumlah Pekerja, sedangkan Aglomerasi Industri tidak berpengaruh signifikan. Nilai koefisien UMP sebesar 0,859510 dengan tingkat signifikansi 0,0000 menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan daya beli masyarakat dan kegiatan konsumsi yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah. Begitu pula dengan Jumlah Angkatan Kerja dengan koefisien sebesar 0,800111 dan signifikansi yang sama menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang aktif bekerja berdampak positif terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Sementara itu, Aglomerasi Industri dengan nilai koefisien sebesar 0,061470 dan nilai signifikansi sebesar 0,2078 tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Hal ini dapat dijelaskan bahwa meskipun terdapat konsentrasi industri di suatu daerah, namun



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

keberadaannya belum mampu memberikan kontribusi langsung yang optimal terhadap pendapatan daerah, mungkin karena hasil ekonomi dari aglomerasi tersebut lebih banyak dinikmati oleh sektor swasta atau pemerintah pusat, atau karena mekanisme pemungutan pajak dan retribusi dari kegiatan industri oleh pemerintah daerah belum optimal. Oleh karena itu, peran aglomerasi industri dalam mendorong peningkatan PAD masih memerlukan kebijakan intervensi yang tepat, seperti insentif fiskal daerah dan pengembangan rantai nilai lokal yang lebih inklusif.

Pandangan Ekonomi Islam pada Aglomerasi Industri, Upah Minimum Provinsi, dan Jumlah Angkatan Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah se-Pulau Sumatera Tahun 2018-2024

Ekonomi Islam berpendapat bahwa pengembangan ekonomi lokal harus ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Prinsip utama yang mendasari hal ini adalah keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan larangan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Ini sejalan dengan maqasid al-syariah yang dijabarkan oleh al-Ghazali, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Oleh karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak seharusnya hanya diukur dari segi angka fiskal, tetapi harus mencerminkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam ekonomi Islam, partisipasi masyarakat lokal bukan sekadar saran, melainkan suatu kewajiban moral dan sosial.

Berdasarkan buku yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam (Penamuda, 2024), partisipasi masyarakat setempat dalam sistem ekonomi Islam adalah suatu kewajiban yang muncul dari tiga prinsip utama, yaitu keadilan, peran sosial aset, dan tanggung jawab sosial.

Pertama, pandangan mengenai aset sebagai amanah serta fungsi sosial menunjukkan bahwa pada dasarnya, harta bukanlah milik sepenuhnya manusia, melainkan titipan dari Allah SWT. Musthafa Ahmad az-Zarqa mengatakan bahwa aset tidak hanya harus digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. Akibatnya, perusahaan besar atau asing yang beroperasi di suatu wilayah harus melibatkan masyarakat setempat sehingga keuntungan tidak hanya diperoleh oleh investor dan pemilik modal, tetapi juga dirasakan oleh komunitas di sekitarnya.

Kedua, prinsip keadilan dan larangan konsentrasi kekayaan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Hasyr: 7) yang melarang harta hanya beredar di kalangan orang kaya. Prinsip ini, dijelaskan dalam buku, menjadi landasan distribusi yang adil dalam sistem ekonomi Islam. Dalam konteks industri besar/asing, keterlibatan masyarakat lokal merupakan instrumen untuk mencegah ketimpangan dan menciptakan pemberdayaan ekonomi yang merata.

Ketiga, dari sisi ontologis, Islam menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertugas mengelola sumber daya secara adil, bijak, dan bermanfaat. Dalam kerangka ini, keterlibatan masyarakat lokal merupakan wujud dari amanah kekhalifahan, sebab industri tidak seharusnya hanya berfokus pada keuntungan finansial, namun juga pada masalahah 'ammah (kemaslahatan umum).

Keempat, buku ini juga menekankan prinsip tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Pemilik modal dan pengusaha diwajibkan memperhatikan kepentingan masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan, mendukung pertumbuhan UMKM, mengurangi



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

kesenjangan sosial, serta menghindari praktik eksploitasi. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat lokal merupakan implementasi langsung dari nilai tanggung jawab sosial yang melekat pada sistem ekonomi Islam.

Gagasan ini ditekankan dalam karya-karya ekonomi Islam yang menyatakan bahwa tujuan sistem ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata, memberikan peluang seluas-luasnya bagi semua pelaku usaha serta memanfaatkan sumber daya demi kepentingan bersama. Secara nyata, kebijakan pemerintah daerah juga berperan penting dalam menjamin keadilan ini. Pemerintah dapat mengatur kewajiban perusahaan besar/asing untuk memperkerjakan tenaga kerja lokal, melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta membangun kolaborasi dengan pelaku UMKM lokal. Dengan demikian, eksistensi industri bukan sekadar sarana pengumpulan keuntungan, tetapi juga instrumen mewujudkan kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, dan pemerataan manfaat.

- Pengelompokan industri dipercaya bisa meningkatkan efisiensi, membuka lapangan kerja, dan memperluas sumber pajak daerah. Namun, dari sudut pandang islam, kegiatan industri perlu mematuhi prinsip halal-tayyib, melindungi lingkungan, dan menjamin distribusi keuntungan yang adil. Al-qur'an menekankan larangan untuk merusak bumi dan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan. Apabila pengelompokan ini hanya menguntungkan perusahaan besar tanpa melibatkan masyarakat setempat, maka prinsip keadilan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, pencapaian keadilan ekonomi harus dilakukan bukan hanya partisipasi masyarakat lokal tetapi juga melalui kebijakan fiskal yang berkeadilan. Salah satu pendekatannya adalah memetakan rasio pajak standar untuk perusahaan asing berdasarkan jumlah tenaga kerja lokal yang mereka serap. Semakin banyak tenaga kerja lokal yang dipekerjakan, semakin rendah tarif pajak yang dikenakan kepada perusahaan. Sebaliknya, jika suatu perusahaan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja asing, tarif pajak harus ditingkatkan sebagai bentuk kompensasi dan sebagai alat untuk menjaga keseimbangan kesempatan kerja. Model kebijakan ini sejalan dengan teori keuangan publik oleh richard a. Musgrave (1959), yang menekankan pentingnya distribusi fiskal untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi.
- Kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) selaras dengan ajaran islam yang menekankan pentingnya keadilan dalam memberikan gaji. Rasulullah saw pernah mengatakan: "bayarkanlah gaji kepada buruh sebelum keringat mereka mengering" (hr. Ibn majah, no. 2443). Upah yang pantas bukan hanya menjamin kehidupan pekerja, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat sehingga memperluas sumber pendapatan daerah. Namun demikian, islam mengedepankan keseimbangan, sehingga penentuan gaji harus memperhatikan kemampuan serta produktivitas.
- Besarnya Jumlah Angkatan Kerja menjadi keuntungan jika ada cukup peluang kerja. Dalam pandangan islam, pekerjaan dianggap sebagai ibadah dan juga sebagai tanggung jawab manusia sebagai wakil tuhan di dunia. Maka dari itu, pemerintah di tingkat daerah harus menciptakan peluang kerja yang produktif, memperbaiki keterampilan para pekerja, dan



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

memberdayakan masyarakat. Langkah ini akan mendorong aktivitas ekonomi yang berkontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi.

Dengan demikian, perspektif Ekonomi Islam menegaskan bahwa konsentrasi industri, UMP, serta jumlah angkatan kerja akan memberikan dampak yang maksimal terhadap PAD jika dikelola sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Tujuan akhirnya adalah *falāḥ* (kesejahteraan di dunia dan akhirat), yaitu pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan finansial, tetapi juga menekankan pada nilai moral, sosial, dan lingkungan.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersamaan, pengelompokan industri, upah minimum di daerah, dan ukuran angkatan kerja memiliki dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sepuluh provinsi Pulau Sumatera antara tahun 2018 hingga 2024. Namun, jika dianalisis terpisah, hanya variabel upah minimum dan jumlah tenaga kerja yang terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, sedangkan pengelompokan industri tidak menunjukkan dampak yang berarti. Temuan ini menekankan bahwa pertumbuhan PAD lebih dipengaruhi oleh penerapan kebijakan pengupahan yang adil dan pengoptimalan tenaga kerja produktif dibandingkan dengan konsentrasi industri. Dalam konteks Ekonomi Islam, temuan ini sejalan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan maslahah, yang menekankan pentingnya pemerataan manfaat ekonomi.

Dari sudut pandang teori, penelitian ini memberikan kontribusi pada studi ekonomi regional dengan menekankan pentingnya variabel ketenagakerjaan dalam menentukan kemandirian keuangan daerah. Selain itu, dapat diusulkan teori baru bahwa elemen yang mendorong PAD di daerah dengan karakter industri campuran lebih dipengaruhi oleh kebijakan upah dan penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan tingkat pengelompokan industri itu sendiri. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan perlunya pemerintah daerah di Sumatera untuk merumuskan strategi fiskal yang berfokus pada penetapan upah minimum yang tepat, penciptaan lapangan kerja yang produktif, serta integrasi kebijakan industri dengan ekonomi lokal agar manfaatnya dapat terdistribusi lebih merata.

Selanjutnya, dapat ditegaskan bahwa penguatan PAD tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis seperti pengelompokan industri, kebijakan upah minimum, dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga memerlukan kebijakan yang berlandaskan dalam sudut pandang ekonomi Islam, pengembangan ekonomi di tingkat lokal harus fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat setempat bukan hanya sekadar saran, melainkan adalah kewajiban moral dan sosial yang berlandaskan pada prinsip keadilan, fungsi sosial kekayaan, serta tanggung jawab sosial. Ini mendorong agar perusahaan besar maupun yang berasal dari luar tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberdayakan komunitas sekitar lewat penciptaan lapangan kerja, dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan daerah harus menjamin partisipasi masyarakat lokal sehingga keberadaan industri benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan pemerataan dalam konteks *maqāṣid al-syarīʿah*.



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mempertimbangkan tiga variabel independen utama, sementara terdapat banyak faktor lain seperti kualitas infrastruktur, investasi daerah, serta pengelolaan pajak dan retribusi yang mungkin juga berpengaruh terhadap PAD. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian di masa mendatang mencakup lebih banyak variabel dengan mengikutsertakan faktor struktural dan kelembagaan, serta menggunakan metode analisis yang lebih beragam, seperti model spasial atau pendekatan kualitatif-komparatif. Selain itu, arah pengembangan penelitian bisa fokus pada eksplorasi peran ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pemanfaatan zakat, wakaf, dan instrumen sosial Islam lainnya sebagai alternatif untuk memperkuat PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hafid, M. & Amri, "Pengaruh Tenaga Kerja Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh," *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 2, No. 1 (2021): 1–11, <https://Ojs.Unimal.Ac.Id/Jeru/Article/View/4801>.
- A. Sari, D., & Haris, "Kebijakan Upah Minimum Dan Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, No. 23 (2020): 85–94, <https://doi.org/10.20473/Jeb.V23i1.2020.85-94>.
- A. Smith, *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations*, 5th Ed., E (London: Methuen & Co., Ltd., London, 1904).
- A. Suryani, "Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah: Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 1, No. 21 (2020): 45–56.
- Agus Febriyanti, Desi; Hidayat, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Angkatan Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Lampung," *Jurnal Ekonomi Daerah* 14, No. 2 (2022): 89–101.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2013).
- Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Usul (Jilid I-Ii)* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1997).
- Al Haq Kamal, *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Islam, Filosofi Dasar Ekonomi Islam*, 2024.
- Andri Sari, Meutia Khairani; Haris, "Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 18, No. 2 (2020): 145–60.
- B. Sari, F. M.; Prasetyo, "Aglomerasi Industri, Upah Minimum, Dan Ketenagakerjaan Terhadap Pendapatan Daerah: Studi Panel 10 Provinsi Di Sumatera," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 23, No. 1 (2023): 45–56.
- Bagus Mulya Pratama et al., "Minimum Wage On The Unemployment Rate In Medan City Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Angkatan Kerja , Indeks Pembangunan Manusia Dan," *MSEJ: Management Studies and Entrepreneurship Journal* 5, no. 1 (2024): 1379–93.
- Beny Febriansyah, "Pengaruh Aglomerasi Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera" (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Padangsidempuan, 2020).
- Chapra. M. U, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000): 118-120.



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

- C. A. Balland, P.-A.; Jara-Figueroa, C.; Petralia, S.; Steijn, M.; Rigby, D.; Hidalgo, "Complex Economic Activities Concentrate in Large Cities," *Nature Human Behaviour* 2, no. 3 (2018): 198–205, <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41562-018-0300-0>.
- D. C. Gujarati, D. N., & Porter, *Dasar-Dasar Ekonometrika*, Edisi Ke-5 (Jakarta: Salemba Empat, 2013).
- David Ricardo, *On The Principles Of Political Economy And Taxation* (London: John Murray, 1817).
- Dewi Rahman, Rizky; Putri, "Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi Di Pulau Sumatera," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2021.
- E. O Saputri and A. R Setyanto, "Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Kerja Dan Upah Minimum Regional Terhadap Pendapatan" 3, no. 3 (2024): 76–88, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent>.
- H. Siswanto, D., & Rosdiana, "Islamic Perspectives On Fiscal Decentralization: Lessons For Indonesia," *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management* 4, No. 9 (2016): 514–31, <https://doi.org/10.1108/Imefm-11-2015-0131>.
- Johann Heinrich Von Thünen, *Der Isolierte Staat In Beziehung Auf Landwirtschaft Und Nationalökonomie* (Hamburg: Perthes, 1826).
- John M. Quigley, "Urban Diversity And Economic Growth," *Journal Of Economic Perspectives* 12, No. 2 (1998): 127–38, <https://doi.org/10.1257/Jep.12.2.127>.
- Joko Hari Prasetyo, E.; Mulyo, "Dampak Aglomerasi Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Jawa Tengah," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 7, No. 1 (2018).
- L. Putra, A., & Melati, "Kinerja Keuangan Daerah Di Wilayah Tambang: Studi Di Bangka Belitung," *Jurnal Ekonomi Daerah* 6, No. 1 (2019): 43–53, <https://ejournal.stiebb.ac.id/index.php/jed/article/view/76>.
- L. Wahyuni, "Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 8, No. 1 (2017): 45–60, <https://ejournal.unpal.ac.id/index.php/ekp/article/view/218>.
- M. Mahripin, "Formulasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Provinsi (Ump) Di Sulawesi Tengah," *Katalogis* 3, No. 7 (2015): 175–85.
- M. Siregar, "Volatilitas Ekonomi Dan Implikasinya Terhadap Pad Provinsi Riau," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 5, No. 3 (2018): 98–112, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jekp/article/view/27526>.
- M. U. Chapra, *The Future Of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000).
- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Ed. Andi, 1st Ed. (Jakarta, 2018).
- N. Gregory Mankiw, *Principles Of Economics*, 9th Ed. (Boston, Ma: Cengage Learning, 2020).
- Peggy B. Musgrave, Richard A.; Musgrave, *Public Finance In Theory And Practice*, 5th Editio (New York: Mcgraw-Hill, 1989).
- Prasetyo, E.; Mulyo, "Dampak Aglomerasi Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Jawa Tengah."
- R. Et Al. Simanjuntak, "Aglomerasi Industri Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Fiskal Daerah Di Sumatera," *Aglomerasi Industri Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Fiskal Daerah Di Sumatera* 23, No. 1 (2022): 55–68.



Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 9, Nomor 2, Oktober (2025), h.195-219.

10.24252/al-mashrafiyah.v9i2.61348

- R. Jamaluddin, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Pada Kawasan Perbatasan," *Jurnal Ekonomi Daerah* 4, No. 2 (2020): 134–44, <https://ejournal.bappenas.go.id/index.php/jed/article/view/344>.
- R. M. Solow, "A Contribution To The Theory Of Economic Growth," *Quarterly Journal Of Economics* 70, No. 1 (1956): 65–94, <https://doi.org/10.2307/1884513>.
- R. Putra, A., & Rahmawati, "Aglomerasi Industri Dan Kapasitas Fiskal Daerah: Analisis Data Panel Provinsi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 2, No. 18 (2021): 101–15, <https://doi.org/10.22225/jieb.18.2.2021.101-115>.
- R. Sari, D., & Hidayat, "Kendala Optimalisasi Pad Di Provinsi Jambi," *Jurnal Administrasi Publik* 7, No. 2 (2021): 25–34, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jap/article/view/10901>.
- Reza Tianto, "Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah" 13, No. 1 (2022).
- Rina Anggraini, Susi; Fitriani, "Analisis Pengaruh Upah Minimum, Inflasi, Dan Investasi Terhadap Pad Kabupaten/Kota Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 19, No. 1 (2021): 13–25.
- Ruslan Abdul Ghofur, "Pengupahan Dalam Sistem Upah Indonesia Dan Islam," *Al-Adalah* 15, no. 2 (2019): 263, <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.2623>.
- Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, Edisi Ket (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004).
- Setyo Tri Wahyudi, Wahyudi, S. T. (2020). *Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasinya (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn. (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2020).
- Sjafrizal, *Ekonomi Regional: Teori Dan Aplikasi* (Padang: Baduouse Media, 2008).
- W. A. Lewis, "Economic Development With Unlimited Supplies Of Labour," *The Manchester School* 22, No. 2 (1954): 139–91, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x>.
- W. E. Oates, "An Essay On Fiscal Federalism.," *Journal Of Economic Literature* 3, No. 37 (1999): 1120–49, <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>.
- Wael B. Hallaq, *Al-Qur'an Al-Karim Sharia: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).